

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hubungan Internasional, menggambarkan pada hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional, melibatkan analisis yang mendalam terkait kebijakan luar negeri, diplomasi, perjanjian internasional, serta konflik internasional. Definisi ini menekankan pada sifat ilmiah dan pendekatan analitis dalam mempelajari interaksi antara negara-negara, serta aspek kebijakan luar negeri dan konflik internasional sebagai objek kajian yang relevan. Dalam pengertian ini, Hubungan Internasional dipahami sebagai sebuah bidang studi yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami dinamika hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk analisis kebijakan luar negeri, diplomasi, perjanjian internasional, serta konflik internasional sebagai fenomena yang menjadi fokus penelitian. (Baylis, 2017)

Turki merupakan negara yang terletak di Kawasan Eurasia, daratannya terletak di dua benua yaitu benua Asia dan Eropa. Turki, Negara dengan sistem pertahanan dan keamanan yang keanggotaannya telah diasosiasikan penuh ke North Atlantic Treaty Organization (NATO). Kehadiran millennium baru berhasil membuat hybrid antara Islam dan demokrasi, memberikan pengaruh kepada masyarakat Turki untuk memilih partai Islam menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan masyarakat Turki

memperoleh dampak yang signifikan dengan adanya penerapan nilai dan praktik demokrasi dalam system pemerintahan. (Abdulkadir Baharcicek, 2011)

Keberhasilan demokrasi Turki tersebut terus berkembang sehingga Turki muncul sebagai role model bagi negara-negara Muslim khususnya di Kawasan Timur Tengah. Turki sebagai model telah sukses dengan ide Islam demokrasi meskipun beberapa decade terakhir dianggap sebagai konsep yang kontroversial. Model demokrasi Turki dijadikan rujukan model demokrasi masa depan bagi Gerakan Islam di Mesir dan Tunisia. Keberhasilan tersebut membuat Turki dihormati di Kawasan dengan peran utamanya sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik. Turki juga berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan di Kawasan sehingga Turki diperhitungkan dalam setiap isu-isu regional maupun internasional. (Kardi Gursel, 2011)

Pada tahun 2002, terjadi pergantian dalam pemerintahan Turki ketika Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berhasil meraih mayoritas suara. Sebagai hasilnya, Recep Tayyip Erdogan, yang merupakan pemimpin partai tersebut, menjadi Perdana Menteri Turki. Di bawah kepemimpinan Erdogan, ada perubahan signifikan dalam kebijakan Turki, termasuk kebijakan luar negeri. Erdogan bekerja bersama dengan Ahmet Davutoglu, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, dalam merumuskan kebijakan ini. Bersama-sama dengan AKP, Davutoglu dan Erdogan memiliki tujuan untuk mengembalikan kejayaan Kekaisaran Ottoman atau menciptakan "Neo-Ottomanisme" dengan Turki sebagai negara dominan di kawasan tersebut. Pernyataan ini diungkapkan oleh Davutoglu dalam pidatonya ketika ia

mengatakan, "Sama seperti kita mengharapkan Turki yang baru, kita juga mengharapkan Timur Tengah yang baru". (Karacasulu, Nilufer, 2015)

Untuk mencapai tujuan pembentukan Neo-Ottomanisme, Turki memulai dengan membangun kerjasama dan hubungan yang positif dengan negara-negara tetangganya, terutama di kawasan Timur Tengah. Pemerintahan Erdogan mengenalkan kebijakan luar negeri baru dengan motto "zero problem with our neighbors," yang mencerminkan aspirasi Turki untuk menjalin hubungan harmonis dengan negara-negara tetangga melalui pendekatan berfokus pada kekuatan lunak (soft power). Turki berupaya mengurangi sebanyak mungkin masalah dalam hubungannya dengan negara-negara tetangga atau bahkan menghilangkannya sama sekali. Dalam usaha ini, Turki lebih condong untuk menyelesaikan masalah tersebut secara konstruktif daripada mengadopsi pendekatan konfrontatif yang dapat memperburuk situasi. Karena proses keanggotaan Turki dalam Uni Eropa menghadapi hambatan, pemerintahan Erdogan memutuskan untuk mengubah arah kebijakannya. Hal ini dinyatakan dalam sebuah dokumen visi yang disusun oleh Ahmet Davutoglu, di mana Turki akan menitikberatkan kerjasama di kawasan Timur Tengah. (Amet Davutoglu, 2012).



***Gambar 1 1 Peta Timur Tengah***

Sumber: <https://kumparan.com/>

Timur Tengah merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan sejarah panjang yang kompleks, yang telah mengalami berbagai konflik dan perubahan politik selama bertahun-tahun. Salah satu negara yang memiliki peran penting di wilayah ini adalah Turki, dengan lokasinya yang strategis sebagai jembatan antara Asia dan Eropa serta menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedelapan di dunia. Wilayah Timur Tengah juga selalu menjadi wilayah yang penting dan kompleks dalam hubungan internasional global. Wilayah ini terletak di persimpangan tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa, yang menjadikannya sebagai tempat pertemuan berbagai budaya, agama, dan kepentingan politik. Keadaan ini menjadikan Timur Tengah sebagai wilayah yang rawan terhadap konflik, baik antar negara maupun internal. (Dalay, G. (2022).

Oleh karena itu Turki, sebagai salah satu negara yang memiliki kepentingan di Timur Tengah, Turki telah memainkan peran penting dalam sejarah wilayah ini. Dalam

beberapa tahun terakhir, Turki mengalami banyak perubahan dalam kebijakan luar negerinya. Sebelumnya, Turki sering dikritik oleh beberapa negara Barat karena tindakan agresifnya di wilayah Suriah dan Libya. Namun, perubahan kebijakan luar negeri Turki berubah mulai seiring dengan dinamika yang terjadi, perubahan ini menjadi sorotan karena adanya tanda-tanda bahwa Turki semakin kooperatif dalam mengatasi konflik di Timur Tengah. Turki telah memperbaiki hubungan dengan negara-negara yang bertentangan di wilayah Timur Tengah dan mengadopsi bahasa yang lebih fokus pada ekonomi dan kerja sama. Meskipun demikian, banyak sumber ketegangan antara Turki dan musuh-musuhnya sebelumnya tetap belum terselesaikan. Faktor-faktor seperti keharusan ekonomi, pengurangan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut, awal pemerintahan Biden di Gedung Putih, gagasan bahwa wilayah tersebut telah memasuki fase pasca Musim Semi Arab, dan kebuntuan dalam konflik regional semuanya memengaruhi kebijakan pengaturan ulang Turki. Secara geopolitik, perhatian utama kebijakan luar negeri Turki saat ini adalah mematahkan keberpihakan anti-Turki di Mediterania Timur dan mengimbangi pengaruh Iran. Turki juga menuju pemilihan pada 2023 di tengah pusaran ekonomi, sehingga kebijakan luar negeri perlu dikalibrasi ulang. Namun, hubungan Turki dengan negara-negara antagonis di wilayah tersebut masih rapuh dan tanda-tanda eskalasi membayangi hubungan Turki yang bermasalah dengan Iran dan Yunani (Atar, E. 2020)

Timur Tengah yang dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling rawan konflik di dunia. Konflik-konflik di wilayah ini tidak hanya berdampak pada negara-negara di wilayah tersebut, tetapi juga mempengaruhi stabilitas keamanan global. Turki

sebagai negara dengan posisi geostrategis yang penting di Timur Tengah, memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi konflik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perubahan kebijakan luar negeri Turki memiliki potensi untuk mempengaruhi dinamika konflik di Timur Tengah dan stabilitas keamanan global. (Robinson, K. 2022)

Turki merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di wilayah Timur Tengah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Turki memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, Turki juga memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara di wilayah Balkan dan Kaukasus, serta memiliki peran penting dalam perdagangan internasional dan energi. Dalam kebijakan luar negerinya di Timur Tengah, Turki memiliki beberapa tujuan utama, antara lain memperkuat posisinya sebagai pemimpin di wilayah tersebut, melindungi kepentingan nasional, dan mengatasi konflik-konflik yang terjadi di wilayah tersebut. (Zafar, A. 2021)

Namun, kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor regional dan global. Faktor-faktor ini meliputi persaingan regional antara Turki dan Arab Saudi, hubungan dengan Rusia dan Iran, serta hubungan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tujuan utama kebijakan luar negeri Turki adalah melindungi kepentingannya di lingkungan global dan regional yang tegang. Turki selalu berusaha menciptakan kondisi untuk perdamaian dan pembangunan berkelanjutan dengan negara tetangga.

Namun, yang lain percaya bahwa keamanan, proyeksi kekuatan, pertimbangan rasional, dan perpaduan kepentingan nasional telah memaksa Turki untuk mengarahkan kebijakan luar negerinya ke Timur Tengah. Setelah pemberontakan Arab, tantangan geopolitik dan keamanan regional membuka saluran baru untuk kebijakan luar negeri Turki, yang membuat Ankara bahkan terlibat di wilayah tersebut. Itu memulai keterlibatan kemanusiaan dan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, keterlibatan Ankara di Timur Tengah semakin meluas dan menjadi pihak ketiga dalam konflik regional. Normalisasi hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, terutama dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Israel, akan membuka saluran baru untuk menambah aset diplomatik, strategis, dan ekonomi Turki dalam kebijakan luar negerinya. Ikatan yang tegang antara aktor-aktor regional terkemuka telah terbukti merusak pemahaman tentang prospek sebenarnya dari hubungan ekonomi. (Sandano, A, I. 2022).

Namun, perubahan dalam kebijakan luar negeri Turki juga dipengaruhi oleh faktor-faktor regional dan domestik. Misalnya, Turki masih memiliki perselisihan dengan Arab Saudi terkait kepemimpinan Islam di wilayah tersebut, serta memiliki hubungan yang kompleks dengan Rusia dan Iran. Selain itu, faktor domestik seperti politik internal dan ekonomi juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki di Timur (Borzell and Risse. 2018)

Turki dan Arab Saudi termasuk dalam kategori negara-negara dengan pengaruh regional yang besar di wilayah Timur Tengah. Kedua negara tersebut telah memegang peran sentral dalam dinamika kawasan ini. Turki telah berperan aktif di Timur Tengah

sepanjang Perang Dingin dan setelahnya, berkat kekuatan ekonomi dan militer yang kuat. Di sisi lain, Arab Saudi merupakan aktor berpengaruh dalam politik Arab dan dunia Muslim secara keseluruhan, berkat keuangan yang kuat, posisi kepemimpinan di Semenanjung Arab, dan pengaruhnya yang luas termasuk terhadap Gulf Cooperation Council (GCC), Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ini menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang dianggap penting oleh Turki. (Cafiero, G, and Azodi, S. 2021)



*Gambar 1 2 Arab Saudi 1932*

Sumber: <https://commons.wikimedia.org/>



Sejak pendirian Arab Saudi pada tahun 1932, negara tersebut telah menjalin hubungan diplomatik dengan Turki. Kualitas hubungan antara keduanya sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu serta cara masing-masing negara merespons peristiwa yang melibatkan atau berdampak pada keduanya. Tidak dapat disangkal bahwa selama perjalanan hubungan bilateral mereka, Arab Saudi dan Turki sering mengalami fluktuasi dalam dinamika masalah yang memengaruhi hubungan mereka. Perubahan dalam hubungan Saudi-Turki ini sebagian besar dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik di Turki, termasuk beberapa upaya kudeta militer yang terjadi pada tahun 1980-an dan 1990-an. Hubungan mereka cenderung membaik ketika partai-partai Islam atau sipil berkuasa di Turki, karena memiliki hubungan budaya dan agama yang dekat dengan negara-negara Muslim di sekitarnya. Hubungan antara kedua negara menjadi lebih kuat setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang sering disebut sebagai AKP, berkuasa di Turki pada tahun 2003. Selama dekade tersebut, hubungan ini terus berkembang positif. Berbeda dengan pemerintahan sekuler yang memerintah Turki sejak tahun 1923, pemerintahan AKP menempatkan prioritas tinggi dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Arab dan negara-negara Islam lainnya. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 dan perubahan dalam keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut membawa Arab Saudi dan Turki semakin mendekat. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bersama mereka terkait jatuhnya Irak ke tangan pesaing mereka. (Nienke, V. H. & Bob, D. 2022)

Namun, Bagaimanapun, Arab Spring pada tahun 2011, yang merupakan gelombang pemberontakan rakyat di berbagai negara Arab, memiliki dampak negatif

pada hubungan antara Arab Saudi dan Turki. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendekatan dan ketidakselarasan kepentingan di antara keduanya terkait dengan Arab Spring. Turki mendukung Arab Spring dengan melihatnya sebagai peluang untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat Arab dan pemerintahan yang baru serta sebagai langkah menuju perdamaian dan keamanan regional. Di sisi lain, Arab Saudi melihat pemberontakan tersebut sebagai ancaman yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan yang berkepanjangan di Timur Tengah. Perbedaan pendekatan dan kepentingan antara kedua negara ini menjadi sangat jelas terutama dalam sejumlah peristiwa di Mesir, termasuk selama pemberontakan anti-Mubarak pada tahun 2011 dan perubahan politik pada bulan Juli 2013. Hubungan antara mereka semakin merenggang ketika Arab Saudi berhasil menggagalkan upaya Turki untuk mendapatkan posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2014. Dinamika hubungan antara Arab Saudi dan Turki memang sangat kompleks. Hubungan di antara keduanya sering mengalami fluktuasi, karena terdapat perbedaan pendapat, perspektif, dan kepentingan dalam menghadapi berbagai isu yang memengaruhi kedua negara. Hubungan yang sedang berlangsung antara Arab Saudi dan Turki saat ini sering digambarkan sebagai "frenemies" atau sebagai teman dan musuh sekaligus, mengindikasikan adanya hubungan yang rumit dan rivalitas di antara keduanya. (Thomas, S. 2019).

Namun, Hubungan antara kedua negara ini semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2017-2020, Arab Saudi dan Turki menunjukkan perspektif, sikap, dan kepentingan yang sering berlawanan, terutama dalam merespon

krisis diplomatik Qatar dan kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Ketegangan antara keduanya tetap tinggi selama tahun 2019-2020, di mana Arab Saudi secara berulang kali mengutuk tindakan Turki, termasuk agresi Turki di wilayah timur laut Suriah, serangan Turki-Iran di bagian utara Irak, dan keterlibatan Turki dalam konflik di Libya, serta berbagai isu lainnya. Otoritas Arab Saudi bahkan mengambil langkah untuk memblokir akses ke portal berita Turki, seperti Anadolu Agency dan TRT Arabic, sebagai respons terhadap liputan negatif terhadap kerajaan tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari kebijakan terbaru Riyadh terhadap Ankara (Nordic Monitor, 2020). Selain itu, pada bulan Juli 2020, kelompok pengusaha swasta non-pemerintah mengeluarkan seruan untuk boikot produk-produk Turki sebagai respons terhadap "hostilitas" yang ditunjukkan oleh pemerintah Turki terhadap pemerintah Arab Saudi. (Coskun, O. and Gumrukcu, T. 2022)



***Gambar 1 3 Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan***

Sumber Gambar: <https://www.kompas.id/>

Pada Periode ke-2 Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan di Turki, Terdapat upaya maupun perubahan yang cukup signifikan, dimana Turki yang sering bertentangan dengan Arab Saudi mencoba lebih kooperatif dan ingin menjalin Kerjasama dengan. Upaya kebijakan luar negeri yang menunjukkan pendekatan yang lebih kooperatif terhadap Arab Saudi terlihat dari bagaimana Turki mencoba memulihkan hubungan diplomatic, Setelah periode ketegangan terkait kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, Turki dan Arab Saudi melalui upaya diplomasi berusaha memulihkan hubungan bilateral mereka. Pada tahun 2019, kedua negara memulihkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar mereka di masing-masing negara, menandakan langkah menuju normalisasi hubungan. Adapun upaya sebelumnya dimana dialog politik dan pertemuan bilateral Pada periode ke-2 kepemimpinan Erdogan, terjadi pertemuan dan dialog politik antara Turki dan Arab Saudi. Pertemuan antara Presiden Erdogan dan Pangeran Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, di Istanbul pada tahun 2018 adalah salah satu contohnya. Pertemuan-pertemuan ini memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk membahas isu-isu bilateral dan regional, serta meningkatkan saling pemahaman. Kemudian Kerja sama ekonomi dan investasi, Pemerintahan Erdogan telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Arab Saudi. Hal ini terlihat dari penandatanganan perjanjian kerjasama ekonomi dan investasi antara kedua negara. Penandatanganan perjanjian semacam ini bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bilateral, investasi saling menguntungkan, serta kerjasama dalam sektor-sektor ekonomi seperti energi, pariwisata, dan infrastruktur. (Aydintasbas, A. 2021)

Kerja sama dalam isu-isu regional, meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam beberapa isu regional, Turki dan Arab Saudi tetap mencari kesempatan untuk bekerja sama dalam mencari solusi dan mengatasi konflik di Timur Tengah. Contohnya, keduanya terlibat dalam upaya diplomasi regional terkait konflik Suriah dan Yaman, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Kemudian adapun Peninjauan kembali retorika dan pendekatan kritis, Pada periode terkini, Erdogan dan pemerintahan Turki mengurangi retorika yang kritis terhadap Arab Saudi. Ada upaya untuk mengurangi ketegangan dan fokus pada kerja sama dalam isu-isu yang dapat menjadi titik kesamaan antara kedua negara. Adapun visi dari kebijakan luar negeri Turki menurut Ahmet Davutoglu, mantan menteri luar negeri dan ahli teori utama Turki baru visi, menegaskan bahwa dekade setelah Perang Dingin mewakili dekade yang hilang bagi Turki, seperti yang dilakukan terakhir tidak mengadopsi visi terpadu, berpuas diri dengan kebijakan "reaksi" atau "tanggapan krisis". Atas dasar ini, visi Turki berpusat pada kebutuhan Turki untuk memiliki kebijakan luar negeri yang diarahkan ke setiap wilayah, dengan integrasi antara dimensi kebijakan ini dan wilayahnya. (Aydintasbas, A. 2021)

Indikasi perubahan kebijakan luar negeri Turki dari yang awalnya agresif menjadi lebih kooperatif terhadap Arab Saudi dalam berbagai kasus, termasuk Kasus Suriah, Kasus Qatar, dan Kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, dapat dipahami dalam konteks perkembangan geopolitik dan dinamika regional yang kompleks di Timur Tengah. Pertama, dalam Kasus Suriah adalah salah satu contoh utama perubahan kebijakan luar negeri Turki dari yang awalnya agresif menjadi lebih kooperatif terhadap Arab Saudi.

Pada awal pemberontakan di Suriah pada tahun 2011, Turki secara aktif mendukung kelompok pemberontak yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Turki memberikan basis logistik, pelatihan, dan bahkan mengizinkan pasokan militer melalui perbatasannya. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik di Suriah semakin rumit, dan Turki menghadapi dampak negatif dari perang tersebut. Serangan teroris yang melibatkan kelompok-kelompok ekstremis semakin sering terjadi di dalam negeri, dan Turki juga menghadapi tekanan besar dari krisis pengungsi yang disebabkan oleh konflik Suriah. (Friedman, U. 2011)

Perubahan kebijakan Turki menjadi lebih kooperatif dalam konteks Suriah dimulai ketika Turki mulai menekankan upaya pencapaian solusi politik di Suriah, bukan hanya menggulingkan Assad. Ini melibatkan partisipasi aktif Turki dalam proses perundingan diplomatik, seperti proses Astana bersama dengan Rusia dan Iran. Upaya ini bertujuan untuk mencapai gencatan senjata, membantu penyelenggaraan bantuan kemanusiaan, dan memulai perundingan damai di Suriah. Dalam konteks ini, Turki juga berupaya menjalin kerja sama dengan Arab Saudi, yang memiliki kepentingan serupa dalam mengakhiri konflik di Suriah. Perubahan ini mencerminkan pemahaman Turki tentang kompleksitas konflik Suriah dan konsekuensi negatif yang ditimbulkannya. Turki mulai menggabungkan pendekatan yang lebih kooperatif dengan berbagai aktor regional untuk mencapai solusi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi Suriah. Dalam konteks perubahan ini, hubungan Turki dengan Arab Saudi juga mengalami evolusi, dengan kedua negara mengidentifikasi kesamaan dalam

upaya mereka untuk mengakhiri konflik di Suriah dan menciptakan stabilitas di Timur Tengah. (Ilgit, A. Davis, R. 2013).

Kemudian dalam Kasus Qatar, perubahan kebijakan luar negeri Turki dari yang awalnya agresif menjadi lebih kooperatif terhadap Arab Saudi mencerminkan dinamika regional yang berkembang. Pada tahun 2017, ketika sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, memutuskan hubungan diplomatik dengan dan memblokir Qatar, Turki mengambil sikap yang sangat mendukung Qatar sebagai tindakan protes terhadap tindakan isolasi yang diambil oleh negara-negara tersebut. Turki memberikan dukungan politik, ekonomi, dan militer kepada Qatar, bahkan mengirim pasukan militer ke Qatar untuk memperkuat pertahanannya. Dukungan aktif Turki kepada Qatar bisa dianggap sebagai langkah yang agresif dalam kebijakan luar negeri, karena bertentangan dengan sikap yang diambil oleh negara-negara seperti Arab Saudi yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Dengan kata lain, tindakan agresif Turki terletak pada dukungannya terhadap salah satu pihak dalam konflik regional tersebut, yang pada saat itu bersifat tegas dan keras. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan regional mulai mereda, dan Turki mulai mencari pendekatan yang lebih kooperatif. Ini terutama disebabkan oleh pemahaman Turki akan pentingnya stabilitas regional dan upaya untuk menjaga kerja sama di Timur Tengah. Turki ingin meredakan ketegangan dengan negara-negara dalam blok isolasi, termasuk Arab Saudi, dan menciptakan iklim yang lebih kooperatif. Upaya diplomatik mulai mengambil alih, dan Turki terlibat dalam dialog dengan negara-negara tersebut. (Ozdemir, C. 2017).

Dalam Kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, perubahan kebijakan luar negeri Turki dari yang awalnya agresif menjadi lebih kooperatif terhadap Arab Saudi mencerminkan dinamika yang unik. Ketika pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi, terjadi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada Oktober 2018, Turki awalnya mengambil pendekatan yang sangat tegas dan agresif. Pemerintah Turki secara terbuka mengungkapkan bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak Arab Saudi dalam pembunuhan tersebut, menciptakan ketegangan besar dalam hubungan bilateral antara kedua negara dan menarik perhatian dunia internasional. Namun, setelah periode awal ketegangan, Turki kemudian mengambil pendekatan yang lebih kooperatif dalam menghadapi Arab Saudi terkait kasus Khashoggi. Ini termasuk upaya bersama dengan pihak Arab Saudi dalam penyelidikan kasus Khashoggi, serta mencoba untuk menurunkan ketegangan dan menjaga hubungan diplomatik yang lebih konstruktif. Meskipun Turki tidak sepenuhnya mengesampingkan isu hak asasi manusia dalam kasus Khashoggi, pergeseran ini mencerminkan pemahaman Turki tentang kompleksitas hubungan diplomatik dan geopolitik yang ada di Timur Tengah. Perubahan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya Turki untuk menjaga stabilitas regional dan memulihkan hubungan diplomatik yang lebih konstruktif dengan Arab Saudi, yang merupakan pemain penting di Timur Tengah. Hal ini juga mencerminkan keinginan Turki untuk menjaga hubungan diplomatik yang lebih seimbang dalam menangani kasus yang sangat sensitif ini. (Alsaafin, L. 2018).



Kebijakan luar negeri Turki harus didasarkan pada pertimbangan keamanan internal yang dilihatnya di negara-negara tetangga sebagai sumber ancaman, bukan peluang, ditinggalkan. Ahmet Davutoğlu menjelaskan dalam bukunya yang terkenal (Strategic Kedalaman) bahwa Turki harus berdiri pada jarak yang sama dari semua negara dan semua aktor, dan menghindari masuk aliansi atau sumbu regional apa pun, sehingga selalu berada pada jarak yang sama dari semua pihak, dan berkontribusi pada Yakinkan kembali kekhawatiran pemain regional dan internasional tentang kebijakan Turki Orang Turki Menteri Luar Negeri, Davutoglu mengidentifikasi dasar dan tujuan teori ini dalam (Davutoglu, 2012:63);

- Mencapai keseimbangan antara kebebasan dan keamanan dengan menjamin dan mencapai kebebasan bagi masyarakat.
- Agar Turki menjadi aktif di semua wilayah yang dianggapnya miliknya, bukan di satu wilayah saja yang mejadi miliknya
- Mengadopsi kebijakan perdamaian proaktif, yaitu strategi proaktif untuk menyelesaikan masalah sebelum menjadi eskalasi.
- Mencapai prinsip nol masalah (zero problem) di lingkungan regional Turki

Peneliti memilih judul ini untuk mengetahui Perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Arab Saudi pada periode kedua kepemimpinan Erdogan yang terjadi di tengah dinamika politik di Timur Tengah. Timur Tengah merupakan kawasan yang kompleks dengan banyak konflik dan rivalitas regional. Oleh karena itu, memahami perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Arab Saudi dapat memberikan

wawasan tentang evolusi dinamika politik di kawasan tersebut. Adapun Hubungan antara Turki dan Arab Saudi memiliki implikasi penting bagi kedua negara dan kawasan di sekitarnya. Memahami perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Arab Saudi dapat membantu dalam memahami dinamika hubungan bilateral mereka, termasuk kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan di masa depan. Kemudian dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik dalam bidang hubungan internasional, khususnya dalam konteks perubahan kebijakan luar negeri negara-negara di Timur Tengah, Khususnya antara Turki-Arab Saudi. Penelitian ini dapat mengisi celah pengetahuan dan memberikan wawasan baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri dan dinamika politik di kawasan tersebut. Apa yang menjadi faktor-faktor Perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi. Dan pemaparan diatas menjadi pendorong untuk peneliti supaya mengkaji lebih dalam dan mengembangkan pengetahuan Studi Hubungan Internasional.

Dari penelitian yang dibuat oleh Delfira Irgahayu Pertiwi dari Universitas Andalas tahun 2019 tentang “Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Imigran”. Peneliti menemukan kesamaan dalam meneliti yaitu tentang adanya perubahan kebijakan luar negeri Turki dan dampaknya terhadap isu-isu global. Selain itu adapun persamaan yang dimiliki adalah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki. Faktor internal seperti politik domestik dan kepentingan nasional, sedangkan faktor eksternal seperti pergeseran kekuatan global dan dinamika regional juga menjadi fokus analisis. Perbedaannya adalah pada focus

penelitian, peneliti meneliti perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi Periode kedua Keemimpinan Erdogan 2018-2023, Sedangkan peneliti diatas meneliti Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Imigran membahas tentang bagaimana kebijakan luar negeri Turki terkait imigrasi dan pengungsi.

Dari penelitian yang dibuat oleh Andi Iswa Ilyas dari Universitas Hasanuddin tahun 2018 tentang “Ambivalensi Kebijakan Politik Luar Negeri Turki di bawah Kepemimpinan Erdogan Terhadap Israel”. Peneliti menemukan Kesamaan dalam meneliti yaitu tentang adanya hal pertimbangan faktor – faktor kebijakan luar negeri Turki, seperti isu regional dan global, Hubungan Antarnegara, dan dinamika Politik Internasional. Persamaan lain yang ditemukan adalah, Kedua karya ilmiah mempertimbangkan peran aktor-aktor tertentu dalam kebijakan luar negeri Turki, seperti Presiden Erdogan dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Perbedaannya adalah peneliti memfokuskan pada perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi, Sedangkan Peneliti diatas memfokuskan meneliti kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel, selain itu peneliti diatas juga lebih mempertimbangkan faktor internal Turki, yaitu dinamika politik dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel.

Dari penelitian yang dibuat oleh Dewa Ayu Tania Taradewi dari Universitas Udayana 2015 tentang “Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Tiongkok pada Masa Pemerintahan Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Tahun 2002-2013”. Peneliti menemukan Kesamaan dalam meneliti yaitu tentang adanya Perubahan Kebijakan Luar negeri Turki pada periode tertentu, kemudian terdapat

persamaan seperti faktor Internal dan Eksternal terhadap perubahan kebijakan luar negeri Turki. Perbedaannya adalah peneliti memfokuskan pada perubahan kebijakan Turki untuk Arab Saudi tahun 2018-2023, sedangkan pada peneliti diatas fokusnya adalah pada perubahan kebijakan Turki terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan AKP tahun 2002-2013.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: **“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki untuk Arab Saudi Pada Masa Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan (2018-2023).”**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. antara lain sebagai berikut:

1. Politik Luar Negeri, Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai teori dan perspektif tentang bagaimana kebijakan luar negeri dibuat, dimplementasikan dan dievaluasi oleh suatu negara. Mata kuliah ini membantu peneliti untuk menganalisa perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi pada tahun 2018-2023 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan tersebut.
2. Hubungan Internasional di Timur Tengah, Mata Kuliah ini mempelajari tentang hubungan antar negara di Timur Tengah. Melalui mata kuliah ini, Peneliti dapat mempelajari sejarah dan perkembangan konflik di Timur Tengah, termasuk hubungan antara Turki dengan Arab Saudi di kawasan tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan-kepentingan strategis Turki di Arab Saudi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Rumusan Masalah Mayor**

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayornya yaitu:

**“Bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi Pada Masa Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan 2018-2023?”**

### **1.2.2. Rumusan Masalah Minor**

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor. Peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja Kepentingan nasional Turki di Arab Saudi?
2. Apa saja perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki untuk Arab Saudi Pada Kepemimpinan Erdogan Tahun 2018-2023?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki untuk Arab Saudi?
4. Bagaimana Hubungan Turki – Arab Saudi Pasca perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki 2018-2023?

### **1.2.3. Pembatasan Masalah**

Fokus Penelitian ini adalah pada perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki untuk Arab Saudi pada periode kedua kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan di tahun 2018-2023. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri turki untuk Arab Saudi, seperti faktor Kepentingan Nasional yang menjadi pengaruh terhadap perubahan Kebijakan Nasional Turki ini.

Pembatasan waktu dalam penelitian ini membantu untuk memfokuskan analisis pada tahun 2018-2023 atau pada Periode Kedua Masa Jabatan atau kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan di Turki. Pembatasan ini dilakukan karena masa ini dianggap sebagai periode yang penting dalam mengamati perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi, karena pada saat ini terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Turki di kawasan tersebut. Kemudian Pembatasan wilayah dalam penelitian ini dilakukan pada kebijakan luar negeri Turki di kawasan Timur Tengah dengan fokus pada hubungan Turki dengan negara Arab Saudi. Hal ini dilakukan karena hubungan Turki dengan negara Arab Saudi memiliki dampak yang signifikan pada Hubungan Kedua negara di kawasan tersebut, sehingga memerlukan perhatian yang khusus. Selain itu, dinamika di kawasan Timur Tengah juga dianggap sebagai kawasan yang penting dalam politik Internasional,

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi pada periode kedua kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan di tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh Kebijakan Luar Negeri Turki untuk Arab Saudi terhadap Hubungan antar kedua negara. Serta bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Turki tersebut yang memperhitungkan kepentingan nasional Turki yang berdampak kepada hubungan kedua negara setelah perubahan kebijakan luar negeri Turki terjadi.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana Kepentingan nasional Turki di negara Arab Saudi.
2. Untuk mengetahui perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi pada tahun 2018-2023.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan Kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi.
4. Kemudian, untuk mengetahui Bagaimana Hubungan Turki – Arab Saudi Pasca perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki di periode kedua Erdogan memimpin (2018-2023).

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan serta bahan tambahan informasi dalam studi-studi Hubungan International, Penelitian ini juga diharapkan untuk mengembangkan pemahaman tentang teori-teori hubungan internasional yang relevan dalam konteks perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi pada tahun 2018-2023. Dalam penelitian ini, beberapa teori yang mungkin relevan antara lain teori kepentingan nasional dan Kebijakan Luar Negeri. Dengan menggunakan teori-teori ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi. Dalam hal ini, skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan teori hubungan internasional dan membantu memperkaya pemahaman tentang hubungan internasional di wilayah Timur Tengah, Khususnya Hubungan Turki dengan Arab Saudi. Selain itu, skripsi ini dapat membantu mengisi kekosongan pengetahuan tentang bagaimana faktor-faktor global dan regional mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki untuk Arab Saudi dan bagaimana perubahan kebijakan luar negeri ini memengaruhi hubungan Turki dengan negara Arab Saudi. Hal ini diharapkan dapat membantu para peneliti dan akademisi untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika hubungan internasional kedua negara di Kawasan tersebut dan mencari cara untuk meningkatkan stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut.



### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan peneliti dalam Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan informasi dan studi empiris untuk keperluan akademis dan masyarakat umum. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi bagi para pengkaji Ilmu Hubungan Internasional dan masyarakat pada umumnya.